



Judul : Gara-gara Harga Migor Mahal, DPR Usul Bentuk Panja Dan Hak Angket
Tanggal : Senin, 21 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Gara-gara Harga Migor Mahal, DPR Usul Bentuk Panja Dan Hak Angket

Mahalnya harga minyak goreng (migor) masih menimbulkan polemik. Berbagai kritik dan saran terus disampaikan legislator Senayan agar harga terjangkau.

Usulan terbaru datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR. Mereka mengusulkan hak angket minyak goreng. Diketahui, harga minyak goreng beberapa bulan terakhir menjadi polemik. Pertama, per-

soalan harga minyak goreng yang melambung, lalu Pemerintah mengeluarkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter.

Namun, saat HET minyak goreng sudah ditetapkan, terjadi kelangkaan. Bahkan, di beberapa tempat terjadi antrean panjang.

Akhirnya, Pemerintah mencabut HET. Anehnya, stok minyak goreng yang langka, langsung tersedia. Tetapi, harganya di atas Rp 23 ribu per

liter. Ada pula yang Rp 47 ribu per dua liter. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai, permasalahan minyak goreng, menyangkut kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas pada rakyat.

"Kajian internal Fraksi PKS menemukan pelanggaran undang-undang atas kisruh minyak goreng," tandasnya.

Sementara, Fraksi PPP DPR lebih memilih

membentuk panitia kerja (panja) ketimbang hak angket minyak goreng. PPP tak ingin masyarakat disuguhhi kegaduhan politik mengenai kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. "Kita mencari solusi, bukan mencari gaduh politik," ujar Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. Untuk membahasnya lebih lanjut, berikut wawancara dengan Jazuli Juwaini dan Achmad Baidowi mengenai topik ini.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

JAZULI JUWAINI
Ketua Fraksi PKS DPR

Ada Pelanggaran Undang-Undang



“

Merujuk ketentuan perundang-undangan itu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS mengusulkan Hak Angket tentang Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng.

Mengapa langsung ke hak angket, bukan panja?

Fraksi PKS melihat indikasi pelanggaran sejumlah undang-undang dalam kisruh minyak goreng ini. Sehingga, kami meminta pertanggungjawaban Pemerintah secara politik maupun hukum. Atas dasar itu, pilihan penggunaan hak angket paling tepat.

Apa aturan hukum yang dilanggar?

Antara lain, pelanggaran sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perdagangan Konsumen.

Dalam Pasal 93 huruf e UU Perdagangan tegas dinyatakan, tugas Pemerintah di bidang perdagangan

mencakup mengendalikan ketersebaran, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Pemerintah tidak boleh lari dari tanggung jawab ini.

Atas dasar ini PKS mengusulkan hak angket?

Iya, dan sejumlah pasal lain dalam undang-undang yang sama pun ada larangan dan ancaman pidana bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga. Termasuk, larangan dan pidana manipulasi data dan/atau informasi persediaan barang kebutuhan pokok (Pasal 107 dan 108).

Apa lagi indikasi pelanggaran lainnya?

Ada juga indikasi kongkalikong persaingan dan perjanjian usaha

tidak sehat yang tidak bisa diwasiati Pemerintah. Sehingga, menyebabkan kelangkaan dan kemahalan minyak goreng.

Hal itu terindikasi melanggar Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kami pun menggarisbawahi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan kewajiban Pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan yang adil, serta melindungi hak-hak konsumen.

Apa langkah konkret PKS untuk mengatasi persoalan ini?

Merujuk ketentuan perundang-undangan itu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS mengusulkan Hak Angket tentang Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng. ■ NNM

ACHMAD BAIDOWI
Sekretaris Fraksi PPP DPR

Cari Solusi Bukan Kegaduhan Politik



Dalam rapat dengan Menteri Perdagangan, dalam forum resmi DPR, Fraksi PPP mengusulkan pembentukan panja untuk menginvestigasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Fraksi PKS mengusulkan hak angket minyak goreng. Bagaimana tanggapan Anda?

Untuk menyikapi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, sejak masa sidang ini, saat pertama kali masuk, Fraksi PPP sudah menyuarakan pembentukan panitia kerja (panja) di Komisi VI DPR.

Selain itu, panja di komisi yang menyangkut industriya, Komisi VII.

Fraksi PPP tidak sepakat dengan hak angket minyak goreng?

Yang kami cari adalah solusi, bukan kegaduhan politik.

Maksud Anda hak angket akan menimbulkan kegaduhan politik?

Iya, hak angket akan menimbulkan kegaduhan politik. Kasihan rakyat jika disajikan kegaduhan politik.

Apakah panja akan mendapatkan solusi?

Kami melihat panja itu lebih fokus, lebih spesifik memanggil pihak-pihak terkait agar dapat menemukan solusi permasalahan tentang minyak goreng ini.

Apakah usulan tentang pembentukan panja sudah disampaikan PPP?

Dalam rapat dengan Menteri Perdagangan, dalam forum resmi DPR, Fraksi PPP mengusulkan pembentukan panja untuk menginvestigasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Yang terpenting, segera menemukan solusi supaya persoalan ini tidak terulang. PPP tidak butuh pencitraan dan hiruk pikuk politik. Kami lebih kepada substansi, bagaimana panja menuntaskan, mencari titik temu dan solusi.

Anda yakin dengan cara ini akan menemukan solusi?

Beberapa panja yang dibentuk DPR itu sukses.

Apakah contohnya?

Panja Jiwasraya, itu tidak gaduh tapi terselenggarai masalahnya. Saat ini sedang bejalan Panja Garuda. Itu juga tidak gaduh.

Terpenting adalah substansinya, persoalan ini akan terurat, solusinya tercapai. Bukan kegaduhan yang didapat.

Apakah langkah lain PPP?

PPP juga lebih memilih aksi sosial di lapangan. Kemarin saya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama teman-teman PPP NTB memberikan minyak goreng kepada warga yang tidak mampu. Warga antusias mendapatkan bantuan itu. ■ NNM